

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri lingkungan Denmark terhadap Indonesia, khususnya pada Indonesia-Denmark Energy Partnership Programme (INDODEPP) sebagai manifestasi kerjasama energi bilateral. Dengan menggunakan kerangka *ideas-based state-centric theory* dari Paul G. Harris, analisis menunjukkan bahwa kebijakan Denmark tidak hanya didasari oleh kepentingan material, melainkan lebih dominan oleh interaksi antara ide-normatif dan peran negara sebagai aktor utama. INDODEPP. Kebijakan ini merepresentasikan bagaimana norma global seperti ide mitigasi perubahan iklim, transisi energi dan keadilan global diterjemahkan menjadi aksi konkret, mendukung transisi energi Indonesia sambil memperkuat identitas hijau Denmark.

Komitmen internasional, khususnya Perjanjian Paris 2015 dan NDC Indonesia 2021, berfungsi sebagai norma eksternal yang memperkuat keyakinan moral Denmark tentang tanggung jawab negara maju terhadap mitra rentan. Perjanjian Paris, dengan CBDR sebagai prinsip inti, menekankan bahwa emisi historis Denmark mengharuskan dukungan bagi Indonesia, yang menghadapi masalah iklim struktural seperti banjir, kekeringan, dan ketergantungan pada batu bara. NDC Indonesia menjadi ambisi target yang selaras dengan ide ini, mendorong Denmark untuk mempertahankan INDODEPP sebagai kontribusi bilateral yang memenuhi kewajiban global.

Analisis menunjukkan bahwa ide-normatif ini menciptakan tekanan internal diplomasi hijau Denmark mengubah norma CBDR menjadi narasi kemitraan saling

menguntungkan, di mana transfer teknologi energi baru terbarukan seperti angin dan surya dilihat sebagai solusi logis untuk mitigasi emisi global. Aktor non-negara, seperti State of Green, Energy analyse, dan Concito menerjemahkan ide ini melalui riset dan kampanye publik, yang memengaruhi opini domestik dan parlemen Denmark. Hasilnya, ide-normatif tidak hanya membingkai masalah Indonesia sebagai isu keadilan iklim, tapi juga menciptakan legitimasi politik bagi INDODEPP.

Denmark melalui institusi seperti Kementerian Luar Negerinya bertindak sebagai aktor otonom yang mengoordinasikan dan mengimplementasikan ide-normatif menjadi kebijakan nyata. Kementerian ini berperan sebagai koordinator utama, mengintegrasikan ide ke dalam agenda bilateral untuk memprioritaskan INDODEPP. Meskipun aktor non-negara memberikan input ide, negara tetap dominan sebagai pengambilan keputusan, memastikan bahwa diplomasi hijau diterjemahkan menjadi proyek konkret yaitu kerja sama INDODEPP.

INDODEPP menjadi contoh bagaimana negara Denmark menggunakan otonomi untuk memenuhi norma global tanpa bergantung sepenuhnya pada multilateralisme. Implikasinya adalah bahwa kebijakan luar negeri lingkungan Denmark berhasil karena keseimbangan antara ide dan aksi negara, di mana institusi domestik seperti kementerian berfungsi sebagai jembatan antara visi moral dan realitas bilateral. Secara keseluruhan, peran ini memperkaya pemahaman penelitian tentang dinamika kebijakan, menegaskan bahwa negara tetap sebagai aktor sentral dalam era iklim global.

5.2 Saran

Penelitian ini meneliti faktor pendorong Denmark dalam kebijakan luar negerinya melanjutkan kerja sama energi dengan Indonesia. Namun, keterbatasan meliputi ketergantungan pada data sekunder dan fokus tunggal pada perspektif Denmark, yang mungkin mengabaikan nuansa domestik Indonesia atau dampak lapangan secara empiris. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi variabel eksternal seperti perubahan geopolitik global, yang bisa memengaruhi kelanjutan INDODEPP. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif yang membandingkan model Denmark dengan negara maju lain dalam kerjasama iklim dengan Asia Tenggara. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan kerangka konsep yang berbeda agar menambah kaca mata baru bagi pengetahuan terkait kerja sama yang dilakukan negara maju dengan negara berkembang.

